



GENJOT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp 4,3 Miliar Dhibahkan untuk 45 LPMK

YOGYA (KR) - Dana hibah yang dialokasikan Pemkot Yogya untuk urusan kewilayahan terbilang besar. Salah satu kelembagaan yang rutin mendapatkan hibah tersebut ialah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Tahun ini alokasinya mencapai Rp 4,3 miliar dan sudah siap dicairkan.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogya Octo Noor Arafat mengungkapkan, LPMK merupakan kelembagaan dari unsur tokoh masyarakat di bawah kelurahan. "Dana hibah yang rutin diberikan Pemkot Yogya ini untuk menggenjot pemberdayaan di masyarakat. Kami imbau tiap LPMK yang jumlahnya mencapai 45 unit untuk segera memproses pencairan," urainya di sela Pencananan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat DIY

XIV di Balaikota Yogya, Rabu (3/5).

Tiap LPMK akan mendapatkan dana hibah yang berbeda. Berkisar antara Rp 70 juta hingga Rp 110 juta tergantung permohonan serta pemanfaatannya. Namun dari total 45 LPMK yang ada di Kota Yogya, hingga kini baru ada sekitar 20 LPMK yang memproses pencairan.

Octo berharap, kendati dapat dicairkan hingga akhir tahun namun semakin cepat akan semakin baik. Pasalnya, dana hibah itu nantinya harus dimanfaatkan sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). "Tidak semua yang mengajukan berkas, akan langsung cair. Terutama jika tidak melampirkan pertanggung jawaban pemanfaatan dana hibah tahun sebelumnya," jelasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gonggong Haryono mengaku, pemanfaatan dana hi-

bah LPMK di setiap kelurahan berbeda-beda. Namun dapat untuk pekerjaan fisik seperti padat karya maupun nonfisik berupa pembinaan masyarakat. Dirinya pun berharap, LPMK mampu memfasilitasi lembaga lain yang ada di kelurahan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.

Selain dana hibah LPMK, Pemkot juga rutin memberikan bantuan administrasi bagi RT dan RW. Bantuan administrasi itu mencapai Rp 1,2 juta tiap tahun. Namun khusus bagi RW, masih dialokasikan dana stimulan sebesar Rp 10 juta.

Sementara Plt Sekda DIY Rani Sjamsinarsi menilai, BBGRM harus menjadi momentum pemberdayaan di wilayah. Upaya pemberdayaan masyarakat pun harus difokuskan pada empat aspek yakni kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan. (Dhi) -e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005